

SITUASI GLOBAL VOLATILE, PEREKONOMIAN AKAN MELEMAH

Situasi global saat ini dinilai masih terus sangat volatile (mudah berubah) dan kompleks. Bahkan, dengan kondisi global ini, maka akan sangat berpengaruh pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan akan terus melemah. Kondisi ini juga perlu di waspadai oleh Indonesia sehingga perekonomian bisa dikendalikan. Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa apa yang terjadi saat ini adalah pengaruh kebijakan negara-negara besar seperti Amerika Serikat (AS), termasuk ketika Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif impor resiprokal dan akan mengenai 89 negara. Ini juga dipengaruhi dengan melemahnya peran lembaga multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Dana Moneter Internasional (IMF) hingga World Bank (Bank Dunia). Lembaga lembaga tersebut dinilai tidak dihormati. Lantas, untuk menghadapi masalah seperti ini langkah seperti apa yang harus dilakukan Indonesia, terlebih lagi untuk menghadapi resiprokal tarif impor yang diterapkan AS.

BACA HAL 11...

EKONOMI GLOBAL

Tarif Import Resiprokal
32%

Dampak Spesifik pada Indonesia



Tarif ekspor ke AS naik, menekan tekstil, garmen, alas kaki, dan sawit.



Pemerintah negosiasi, perluas pasar ekspor lain, dorong diversifikasi.



Perlambatan Tiongkok akibat tarif AS bisa turunkan permintaan bahan baku dari Indonesia.

WAPRES GIBRAN SIAP URUS PAPUA, BERKANTOR DI SANA KAH?

**Presiden RI, Prabowo Subianto, memberikan tugas pada Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka, untuk mengurus persoalan di Papua. Atas tugas tersebut, Wapres mengatakan siap menjalan-
kannya dan tengah me-
nunggu perintah selanjutnya mengenai teknis tugas-
tugasnya. Terkait dengan tugas ini, akankah Wapres
berkantor di Papua?**

“Ya kami sebagai pembantu presiden siap ditugaskan di manapun, kapanpun dan saat ini kita menunggu perintah berikutnya, kita siap,” kata Gibran di Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).

Lebih lanjut, Gibran mengatakan beberapa kali telah menugaskan jajarannya dari Sekretariat Wakil Presiden bertolak ke Papua mengurus berbagai hal. “Misalnya ke Sorong, ke Merauke, untuk mengirim alat-alat sekolah, mengirim laptop, mengecek kesiapan MBG,” ucap dia.

Wapres juga mengatakan bahwa tugas terkait dengan persoalan di Papua ini bukan hal baru, namun sudah dimulai sejak era Wapres Ma'ruf Amin di periode sebelumnya. Karena itu, Gibran juga siap melanjutkan kerja keras yang telah dimulai di era Ma'ruf tersebut.

“Kalau saya bisa berkantor di mana saja. Bisa di Jakarta, di Kebon Sirih, bisa di IKN kalau Desember nanti sudah jadi, bisa di Papua, bisa juga di Klaten, di Jawa Tengah. Kita dimanapun, kita jadikan kantor,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa yang paling penting adalah harus sering berdialog dan menerima aspirasi langsung dari masyarakat luas. Sebab itu sebagai sesuatu yang sangat penting bagi berjalannya pemerintahan.

“Karena bagi saya, sekali lagi sebagai pembantu presiden, harus sering ke daerah, harus sering berdialog dengan pelaku-pelaku usaha seperti tadi, menerima masukan, menerima kritikan, evaluasi

apapun itu. Jadi, bisa berkantor di mana saja, bisa bertemu dengan warga, itu yang paling penting,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak akan berkantor di Papua, tetapi di Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

“Tidak mungkin Wakil Presiden akan pindah kantor ke Papua sebagaimana diberitakan oleh beberapa media,” kata Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Yusril mengungkapkan bahwa Wapres Gibran memang mendapat tugas untuk mempercepat pembangunan di Papua, yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 68A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

Dalam Pasal 68A UU Otsus Papua tersebut, diatur tentang keberadaan Badan Khusus untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan otsus Papua.

Dikatakan bahwa Badan Khusus itu telah dibentuk Presiden Ke-7 RI Joko Widodo dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022, namun berbagai aturan terkait dengan pembentukan badan tersebut bisa saja direvisi sesuai kebutuhan untuk lebih mempercepat pembangunan Papua.

Yusril menjelaskan bahwa Badan Khusus Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua itu diketuai Wapres dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, dan satu orang wakil dari tiap provinsi yang ada di Papua.



Tangkapan layar Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan pers usai meninjau Central Lurik di Desa Mleset, Klaten, Jawa Tengah, Rabu (9/7/2025).

Disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai badan itu akan diatur dengan peraturan pemerintah (PP), di mana terdapat kemungkinan struktur sekretariat dan personalia pelaksana badan yang sudah ada ditata ulang dengan PP sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Dengan demi-kian, sambung Yusril, yang ber-kantor di Papua merupakan kesekretariatan dan personalia pelaksana dari Badan Khusus yang diketuai Wakil Presiden tersebut.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengatakan bahwa penugasan Wapres untuk mengurus Papua tercantum dalam Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus).

“Jadi sebenarnya di dalam, ada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang di situ secara eksplisit bahwa percepatan pembangunan Papua itu adalah dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden,” kata Prasetyo, Rabu (9/7/2025).

Prasetyo meluruskan adanya penugasan khusus dari Presiden Prabowo ke Wapres Gibran. Adapun percepatan pembangunan di Papua disebut dikoordinatori oleh Wapres RI. “Jadi kami mau meluruskan bahwa tidak benar yang disampaikan atau yang berkembang di publik bahwa Bapak Presiden menugaskan, memang undang-undangnya mengatur mengenai percepatan pembangunan Papua itu dikoordinatori atau diketuai oleh Wakil Presiden begitu,” kata dia.

Prasetyo mengatakan Tim Percepatan Pembangunan Papua juga mendapat fasilitas negara untuk operasional termasuk adanya kantor. Namun hal itu bukan berarti menugaskan Wapres untuk berkantor

di Papua.

“Ndak (Wapres berkantor di Papua), kalau berkenaan dengan masalah kantor jadi Tim Percepatan Pembangunan Papua itu difasilitasi oleh negara dalam hal ini Kementerian Keuangan, ada kantor KPPN di Jayapura, yang itu memang dipakai nantinya untuk operasional kantor Tim Percepatan ini,” ungkap Prasetyo.

Prasetyo menyebutkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jayapura akan menjadi tempat Tim Percepatan Pembangunan Papua. Kendati demikian, ia menyatakan sesekali Wapres bisa melakukan koordinasi di sana.

“Jadi bukan berarti bahwa Wakil Presiden akan berkantor di Papua, tapi kalau dalam konteks mungkin ya sesekali dapat melakukan rapat koordinasi, beliau akan berkunjung ke sana atau bahkan mungkin sempat berkantor di sana ya ndak ada masalah juga,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR, Indrajaya, mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengurus Papua. Hal tersebut merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap berbagai persoalan di Tanah Papua.

“Ini langkah strategis dan patut diapresiasi. Wapres Gibran bisa lebih dekat dengan persoalan masyarakat dan langsung turun tangan jika ada permasalahan yang perlu penanganan cepat,” ujar Indrajaya kepada media, Rabu (9/7/2025).

Dijelaskannya, menyelesaikan persoalan Papua butuh keseriusan dan pendekatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Terutama dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM), peningkatan layanan pendidikan, kualitas hidup masyarakat dan akses kesehatan yang merata, selain pembangunan fisik dan infrastruktur.

Dengan adanya kantor wakil presiden di Papua, Maka koordinasi lintas kementerian dan lembaga pun diyakini akan lebih efektif dalam merespons kebutuhan daerah secara cepat dan tepat. (rls/ant/lut)

**“Ya kami sebagai
pembantu presiden
siap ditugaskan di
manapun,
kapanpun dan saat
ini kita menunggu
perintah
berikutnya, kita
siap,”**

**GIBRAN
RAKABUMING RAKA**
Wakil Presiden

Komisi VI : Pemerintah dan Sektor Industri Harus Waspada Dampak Resiprokal Tarif Trump

Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang menerapkan resiprokal tarif sebesar 32% pada barang-barang dari Indonesia menimbulkan kekhawatiran termasuk di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sebab, kebijakan Trump tersebut bisa menimbulkan berbagai efek di Indonesia.



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid

Salah satu yang kemungkinan besar terdampak adalah sektor industri. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, mengingatkan pemerintah dan para pengelola kawasan industri strategis agar mewaspadai dampak kebijakan tarif tinggi AS yang ditetapkan Trump tersebut. Dia mengatakan, salah satu yang akan bisa terpengaruh adalah arus investasi dan industri di Batam. Padahal Batam merupakan salah satu pintu gerbang utama perdagangan internasional Indonesia.

“Kinerja ekonomi Batam memang tumbuh positif, tetapi tantangan menjaga investasi sangat besar. Apalagi kemarin kita memahami Amerika, Trump sudah menetapkan tarif impor 32 persen. Ini mungkin juga ada pengaruhnya dalam pengembangan Batam,” ujar Nurdin dalam agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan BP Batam, BPKS Sabang, dan KPPU di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).

Ia menekankan, tingginya tarif impor Amerika Serikat terhadap sejumlah komoditas global dapat memicu perlambatan perdagangan internasional, yang pada gilirannya berdampak pada kawasan industri ekspor seperti Batam.

Lebih lanjut, Nurdin meminta BP Batam dan seluruh pemangku kepentingan melakukan langkah antisipasi agar tetap menjaga daya saing Batam di tengah ketatnya kompetisi kawasan ekonomi khusus regional seperti Singapura dan Johor.

“Kalau mimpi kita menjadikan Batam sebagai destinasi investasi dan kota yang indah, nyaman, maka persaingan ini harus kita jawab dengan terobosan. Jangan sampai kita kalah bersaing akibat efek kebijakan global,” katanya.

Nurdin juga menyampaikan se-

jumlah catatan penting kepada BP Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) terkait pengelolaan kawasan strategis nasional. “Ada ketidaksesuaian dalam pengelolaan kawasan industri dan kebijakan investasi yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi,” ujar Nurdin.

Ia mencontohkan persoalan sengketa lahan, kerusakan lingkungan, hingga konflik dalam proyek Rempang Eco City, yang menurutnya harus menjadi perhatian serius BP Batam. Maka dari itu, dirinya mendesak Kepala BP Batam beserta jajarannya untuk melakukan terobosan dalam menata kembali tata kelola kawasan industri dan investasi agar lebih sinkron.

Selain itu, Nurdin menyoroti ketatnya persaingan dengan kawasan ekonomi khusus lain di Asia Tenggara, sehingga memerlukan langkah-langkah inovatif supaya Batam menjadi destinasi investasi yang indah, nyaman dan kompetitif. Tak hanya soal tata kelola, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga iklim industri dan investasi di Batam di tengah tekanan global.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menekankan perlunya diversifikasi ekonomi agar Batam tidak hanya bertumpu pada sektor industri tertentu. Sektor pariwisata dan jasa,

menurutnya, harus lebih serius dikembangkan.

Lebih jauh, dirinya mengingatkan agar seluruh pengembangan kawasan industri dan investasi tetap berlandaskan konstitusi, khususnya Pasal 33 Ayat 1, 2, dan 3 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor 16 Tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam kerangka demokrasi ekonomi.

“Kinerja ekonomi Batam memang tumbuh positif, tetapi tantangan menjaga investasi sangat besar. Apalagi kemarin kita memahami Amerika, Trump sudah menetapkan tarif impor 32 persen. Ini mungkin juga ada pengaruhnya dalam pengembangan Batam,”

NURDIN HALID

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI

“Prioritas pembangunan nasional harus pada BUMN, koperasi, dan pengusaha kecil. Jangan sampai terulang lagi seperti di Batam dulu, yang lahan-lahannya banyak dimainkan swasta tidak jelas, dicabut jual lagi, dicabut jual lagi,” tegas Nurdin.

Selain faktor eksternal, Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyoroti sejumlah persoalan internal yang bisa menghambat investasi di Batam, antara lain sengketa

lahan, kerusakan lingkungan, serta konflik terkait proyek reklamasi. Menurutnya, persoalan-persoalan tersebut harus segera dibenahi agar Batam barber siap menghadapi tekanan global.

Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Kaisar Abu Hanifah, juga meminta supaya pemerintah melindungi industri dalam negeri seiring dengan kebijakan resiprokal tarif dari Trump yang mulai

diberlakukan 1 Agustus 2025.

“Keputusan Presiden AS untuk mengenakan tarif sebesar 32 persen ke Indonesia harus menjadi momen penting bagi pemerintah untuk memberi perhatian lebih serius kepada industri nasional. Perlindungan konkret terhadap industri dalam negeri mutlak diperlukan agar tidak terlalu terdampak oleh kebijakan ini,” ujar Kaisar, Rabu (9/7/2025).

Ia mengungkapkan, sektor industri berorientasi ekspor seperti tekstil, alas kaki, dan minyak sawit akan menjadi yang paling terdampak dari kebijakan tarif Presiden Trump. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia ke Amerika Serikat pada 2024 mencapai 28,18 miliar dolar AS—tumbuh 9,27 persen dibandingkan tahun sebelumnya—dan menyumbang 9,65 persen terhadap total ekspor nasional.

“Jika pemerintah tidak segera melakukan langkah perlindungan yang konkret, sektor tekstil bisa mengalami penurunan drastis. Kita harus mencegah risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan lonjakan pengangguran,” katanya.

Pemerintah, lanjut Kaisar, sebenarnya telah menyiapkan sejumlah langkah strategis, seperti penguatan regulasi teknis, peningkatan kepatuhan industri terhadap standar internasional, serta optimalisasi kerja sama bilateral dan multilateral. Namun, langkah-langkah itu perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas industri dari hulu ke hilir serta sinergi lintas sektor untuk menjaga daya saing industri nasional.

“Perlindungan tidak cukup hanya dari sisi kebijakan, tapi juga harus menyentuh aspek pemberdayaan pelaku industri agar mereka mampu bertahan dan bersaing di pasar global,” tegas legislator dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Untuk jangka panjang, Kaisar mendorong pemerintah mengurangi ketergantungan impor dari Amerika Serikat dan memperluas pasar ekspor ke negara-negara alternatif yang potensial. “Diversifikasi pasar penting agar kita tidak terjebak pada satu ketergantungan. Peningkatan penyerapan produk dalam negeri juga harus menjadi prioritas,” pungkasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji menekankan pentingnya dukungan fiskal dan diplomasi ekonomi aktif agar pasar AS tetap terbuka bagi produk Indonesia. (rls,ant/lut)

Anomali Cuaca Indonesia

MUSIM KEMARAU MUNDUR, JULI HUJAN EKSTREM

Indonesia sudah memasuki musim kemarau, tetapi sejumlah wilayah malah dilanda hujan ekstrem. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan kondisi ini sebagai anomali cuaca. Sementara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut sebagai fenomena upnormal.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan dinamika atmosfer yang tidak lazim telah menyebabkan mundurnya musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Hal ini sekaligus meningkatkan potensi cuaca ekstrem dalam beberapa pekan terakhir.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, menyatakan, hingga akhir Juni 2025, baru sekitar 30 persen wilayah Zona Musim yang mengalami peralihan ke musim kemarau. "Padahal secara klimatologis, pada waktu yang sama, biasanya sekitar 64 persen wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau," ungkap Dwikorita dalam siaran pers, Rabu (9/7/2025).

Dwikorita mengungkapkan, mundurnya musim kemarau tahun ini merupakan dampak dari lemahnya Monsun Australia dan tingginya suhu muka laut di selatan Indonesia.

Kedua faktor ini menyebabkan kelembapan udara tinggi yang memicu terbentuknya awan hujan, bahkan di tengah periode yang seharusnya kering. Kondisi ini diperburuk oleh berbagai fenomena atmosfer seperti aktifnya Madden-Julian Oscillation (MJO) dan gelombang ekuator (Kelvin dan Rossby Equator) yang mendukung pembentukan awan konvektif dan memperbesar potensi hujan lebat.

"Kendati ENSO dan IOD berada dalam fase netral dan diperkirakan akan tetap netral hingga akhir tahun, curah hujan di atas normal masih terus terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia sejak Mei dan diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025," paparnya.

Kondisi ini berdampak pada mulai terbentuknya hujan ekstrem yang terjadi di berbagai daerah, terutama pada 5 dan 6 Juli lalu. Hujan dengan intensitas lebih dari 100 mm per hari tercatat di Bogor, Mataram, Bantaeng, Bulukumba, dan Sinjai, serta sejumlah wilayah di Jabodetabek, menyebabkan



Warga melewati banjir di Perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (8/7/2025). (dok.ant)

banjir, longsor, pohon tumbang, dan gangguan aktivitas masyarakat.

Ia menyampaikan, BMKG telah memberikan peringatan dini cuaca mingguan dan diupdate secara berkala 3 hingga 6 jam sebelum kejadian berlangsung. Peringatan dini tersebut disebarluaskan melalui aplikasi InfoBMKG, media sosial, WhatsApp Group, dan kanal komunikasi lainnya.

BMKG juga terus berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, operator transportasi, serta instansi teknis lainnya guna mengantisipasi risiko lanjutan.

Fenomena cuaca ekstrem yang terus terjadi ini, kata Dwikorita, menunjukkan bahwa dinamika atmosfer masih sangat aktif meskipun Indonesia telah memasuki periode

kemarau.

Berdasarkan hasil analisis terkini, wilayah yang berpotensi mengalami hujan lebat dalam sepekan ke depan meliputi Jawa bagian barat dan tengah (termasuk Jabodetabek), Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku bagian tengah, dan Papua bagian tengah dan utara.

"Potensi hujan ini diperkirakan akan bergeser ke wilayah tengah dan timur Indonesia pada periode 10 hingga 12 Juli 2025," jelasnya.

Waspada hingga September

Sementara, Kepala Kelompok Kerja Prediksi Indeks Iklim BMKG Indra Gustari mengatakan hujan dengan intensitas tinggi saat musim kemarau bakal terjadi di wilayah

Indonesia dari Juli sampai September 2025.

Indra mengatakan pada Juli, Agustus, dan September 2025 normalnya merupakan musim kemarau. Namun karena anomali cuaca, hujan dengan intensitas tinggi malah turun di periode ini.

"Secara perbandingan dengan normalnya memang curah hujan nya lebih tinggi dibandingkan rata-rata nya artinya memang periode kemarau itu curah hujannya kan kecil secara kuantitatif, beberapa milimeter dibandingkan dengan musim hujan," kata Indra saat ditemui di kantor BMKG, Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Dia menambahkan anomali cuaca membuat curah hujan pada musim kemarau di atas normal. Meski begitu, hujannya tetap tidak setinggi curah hujan saat musim penghujan. Adapun, musim hujan diperkirakan terjadi pada Oktober, November, Desember 2025, serta Januari dan Februari 2026.

"Anomali tadi curah hujannya lebih tinggi, artinya di atas normal namun tingginya itu tidak setinggi musim hujan di bulan Oktober, Desember hingga Januari dan Februari," terangnya. (wid,rls,ant/dya)

BRIN Sebut Pergerakan Awan Upnormal

FENOMENA cuaca ekstrem di Jabodetabek belakangan ini mengejutkan para ilmuwan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Profesor Riset Iklim dan Cuaca Ekstrem BRIN Erma Yulihastin mengatakan, pola hujan yang terjadi merupakan fenomena upnormal.

Ia menyebut hujan ekstrem di Jabodetabek terjadi karena adanya penjaralan sistem awan besar dari Sumatra. Awan jenis mesoscale convective complex (MCC) biasanya muncul saat musim hujan, namun kini terbentuk meski sedang kemarau.

"Ini tidak biasa terjadi pada bulan Juli, harusnya anginnya dari timur. Kalau ada MCC di Sumatra akan menuju ke utara, ini kok bisa menuju ke Jawa," katanya.

"Ini menjadi pertanyaan kami para ilmuwan. MCC ini bisa menuju

ke Kalimantan juga," ujarnya.

Uniknya, kata Erma, MCC tidak langsung sampai ke Jabodetabek. Ia sempat melemah di Laut Jawa lalu menguat kembali.

Fenomena hujan ekstrem terjadi karena adanya penguatan terjadi saat MCC bertemu daratan dan pegunungan. Khususnya di selatan Bogor yang mempunyai struktur geografis kompleks.

"Yang paling khas di jabodetabek, MCC yang masuk kesitu mengalami penguatan karena berinteraksi dengan gunung-gunung di selatan bogor. Interaksi yang kuat antara laut, darat, gunung, itu yang kita lihat sekarang ini yang memelihara MCC itu," katanya.

Menurut studi BRIN tahun 2022, MCC kini lebih sering muncul di luar musimnya. Hal ini, menurutnya mengindikasikan adanya perubahan

PREDIKSI CUACA BMKG

● PRAKIRAAN 8-10 JULI

Umumnya cuaca akan didominasi kondisi berawan hingga hujan ringan. Hujan lebat akan terjadi di Jawa Barat dan Maluku. Sementara angin kencang di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku.

● PRAKIRAAN 11-14 JULI

Umumnya akan berawan hingga hujan ringan. Hujan lebat diperkirakan terjadi di Aceh, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Pegunungan. Untuk angin kencang akan melanda Aceh, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua Selatan.

karakteristik cuaca.

Ia menilai, MCC biasanya dominan terbentuk di Desember hingga Februari. Tapi sekarang bisa terbentuk besar di waktu yang seharusnya musim kemarau. (wid,rri,ist/dya)

DALAM PLEIDOI TOM LEMBONG MINTA DIBEBASKAN

Kuasa Hukum: Tak Ada Sepersen Pun Uang Mengalir

Ketua tim penasihat hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir, menegaskan kliennya tidak menerima aliran dana sepersen pun dalam perkara dugaan korupsi impor gula. Dia menyebut perkara ini sejak awal sarat rekayasa dan tidak berpijak pada pencarian kebenaran materiil.



Menteri Perdagangan (Mendag) RI periode 2015-2016, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong (baju biru) tiba untuk menjalani sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoi terkait kasus dugaan korupsi importasi gula di Tipikor, Rabu (9/7/2025). (ist.kum)

Kuasa Hukum Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, Ari Yusuf Amir meminta majelis hakim untuk membebaskan kliennya.

Hal itu dia sampaikan dalam sidang pembacaan pleidoi atau nota pembelaan dalam kasus dugaan korupsi pada importasi gula kristal mentah yang menjadikan Tom Lembong sebagai terdakwa.

Dalam sidang pleidoi, Ari meminta agar majelis hakim menyatakan Tom Lembong tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan seluruh tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Membebaskan Terdakwa Thomas Trikasih Lembong dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Thomas Trikasih Lembong dari segala tuntutan hukum," kata Ari di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

"Tidak ada satu sen pun aliran dana yang mengalir ke terdakwa, baik secara langsung maupun tidak langsung," lanjutnya.

Menurut Ari, fakta paling mencolok dalam persidangan adalah absennya bukti aliran dana kepada Tom Lembong. Baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Jaksa tidak merasa perlu membuktikan adanya keuntungan pribadi yang diterima terdakwa. Padahal, unsur ini merupakan elemen penting dalam sebuah perkara korupsi," ujar dia.

Dia menilai kondisi tersebut merusak logika hukum dan akal sehat publik. Dia menekankan seluruh kebijakan Tom Lembong selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan dilakukan sesuai hukum dan hasil koordinasi lintas kementerian, termasuk berdasarkan arahan Presiden kala itu, Joko Widodo.

"Tidak ada motif pribadi, tidak ada keuntungan pribadi, dan yang paling penting tidak ada aliran dana. Maka dari itu, kami meyakini masyarakat bisa menilai dengan jernih, perkara ini perlu diuji secara objektif dan adil," ujar dia.

Ungkit Jokowi

Ari juga sempat mengungkit bahwa aktivitas importasi gula yang dilakukan Tom Lembong semasa menjadi Mendag, telah mendapat persetujuan dari Joko Widodo selaku Presiden saat itu. Ia menyebut seluruh keputusan Tom Lembong saat menjabat Menteri Perdagangan dilakukan berdasarkan hukum, arahan Presiden, serta koordinasi lintas kementerian.

"Tuntutan ini bukan hanya tak berdasar hukum, tapi juga mencederai prinsip keadilan dan akal sehat," jelasnya.

Ari menekankan kebijakan impor gula yang menjadi sorotan dalam perkara ini justru dilandasi oleh kebutuhan nasional untuk menjaga ketersediaan stok dan stabilitas harga. Impor tersebut, lanjut Ari, dilakukan

berdasarkan keputusan Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan disetujui Presiden Joko Widodo.

"Impor itu diputuskan dalam Rakortas, bukan semena-mena. Dasar hukumnya jelas. Jadi tidak bisa disebut sebagai penyalahgunaan wewenang," jelas Ari.

K u a s a h u k u m j u g a mempertanyakan dasar tuntutan yang menggunakan audit BPKP tahun 2024. Padahal audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2018 secara tegas menyatakan tidak ada kerugian negara dalam impor gula 2015-2016.

"BPK sebagai lembaga audit resmi negara menyatakan tidak ada kerugian negara. Lalu tiba-tiba tujuh tahun kemudian muncul audit BPKP yang berseberangan? Ini tidak sah dan

melanggar asas ne bis in idem," kata Ari.

Ari menilai metode penghitungan kerugian dalam audit BPKP sangat lemah. Menurutnya, ada kekeliruan dalam asumsi dan penghitungan kurs.

"Ada pengabaian konteks kebijakan yang saat itu ditujukan untuk menekan lonjakan harga dan menjaga pasokan," katanya. (wid,rls ant,ist/dya)

POIN-POIN PLEIDOI TOM LEMBONG

- Tidak Ada Surplus Gula – Saksi dan ahli menyatakan tidak pernah terjadi surplus gula.
- Tidak Ada Pelanggaran Aturan – Impor Gula Kristal Mentah (GKM) dilakukan sesuai aturan.
- Koordinasi Antar Menteri – Semua langkah diambil atas hasil rapat antar menteri, bahkan atas arahan Presiden, bukan inisiatif pribadi.
- Pihak Diuntungkan Tidak Dituntut – Jika ada keuntungan bagi korporasi, maka korporasi yang diuntungkan seharusnya dituntut, bukan Tom.
- Impor Untungkan Negara – Impor justru jaga stabilitas dan beri keuntungan negara, tidak menimbulkan kerugian.
- Tuduhan Penunjukan Tak Terbukti – Tidak ada bukti kuat soal tuduhan arahan menteri menunjuk 8 perusahaan.
- Stabilisasi Bukan Hanya oleh BUMN – Tuduhan bahwa stabilisasi hanya tugas BUMN tidak berdasar.
- Izin dan Kewenangan Sah – Perusahaan yang dituduh tidak punya izin, ternyata sah dan berwenang.
- Penafsiran Surat Menteri – Surat Menteri Perdagangan memperbolehkan kerja sama dengan produsen swasta.
- Bantah Pertemuan dengan Swasta – Tom tidak pernah bertemu swasta terkait penunjukan.
- Penugasan Berdasarkan MoU 2013 – Keterlibatan Inkopkar berdasar MoU era Gita Wirjawan dan Moeldoko.
- Kerja Sama Sudah Ada Sebelum Menjabat – Kerja sama Inkopkar-Angel Product terjadi sebelum Tom menjabat.
- Operasi Pasar Berdasar Hukum – Tuduhan bahwa operasi pasar Inkopkar tak sah, dibantah.

Anies Baswedan dan Hamdan Zoelva Ingatkan Hakim

GOVERNUR DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan meyakini majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta akan memberi putusan adil dan objektif dalam kasus korupsi importasi gula yang menyeret Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) sebagai terdakwa.

"Kami mendoakan dan yakin. Insyaallah ini demi kepastian hukum," ujar Anies saat ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (9/7/2025).

I a m e n g a t a k a n b a h w a kehadirannya di Pengadilan Tipikor Jakarta untuk mendengarkan pembacaan pleidoi alias nota pembelaan Tom Lembong.

Sementara, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan

Zoelva mengingatkan majelis hakim tidak boleh dipengaruhi oleh urusan politik. "Hakim tidak boleh terpengaruh oleh aspek politik. Hakim harus tetap berdasarkan fakta hukum dan keadilan," kata Hamdan, saat menghadiri sidang pleidoi Tom Lembong di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Rabu (9/7/2025).

Hamdan menegaskan, hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara dengan pertimbangan politik. Putusan majelis hakim harus berdasar pada fakta hukum, kebenaran, dan keadilan.

"Sekali lagi, dia tidak boleh ada tekanan politik, tidak boleh berpikiran dalam memutuskan tentang politik," ujar Hamdan.

Pengacara senior itu mengingatkan bahwa hakim harus memegang hati nurani dan

obyektivitas hukum. Sebab, dalam obyektivitas itulah keadilan ditempatkan.

Oleh karena itu, ia meminta hakim untuk melihat perkara Tom Lembong dengan baik. "Mata hati, dan pikiran, dan fakta terhadap fakta-fakta yang ada, dan dengan itulah dia memutuskan perkara," tutur dia. (wid,rls,kcm/dya)

Urai Kemacetan Pasar Gadang, 686 Lapak Sisi Selatan akan Direlokasi

MALANG - Untuk mengatasi langganan kemacetan di kawasan Pasar Gadang, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang akan merelokasi 686 lapak pedagang di sisi selatan pasar.

Relokasi dilakukan sebagai langkah awal penataan. Sekaligus untuk mengembalikan fungsi jalan dan jembatan yang selama ini tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

"Ini upaya kami untuk membenahi Pasar Gadang. Yang pertama, saya ingin dua jembatan bisa dimanfaatkan optimal. Kedua, ini memang terjadi kemacetan dan tidak hanya pada jam-jam puncak saja. Tetapi hampir di tiap jam itu terjadi kemacetan," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Rabu (9/7/2025).

Wahyu mengatakan, langkah awal penataan ini ditandai dengan pembongkaran Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Gadang yang juga berada di sisi selatan pasar tersebut.

Dijelaskannya, salah satu penyebab kemacetan di kawasan tersebut adalah keberadaan pedagang yang menggunakan badan jalan untuk berjualan. Selain itu, limbah cair dari aktivitas jual beli, khususnya pedagang ikan, kerap dibuang ke jalan

hingga menyebabkan kerusakan berulang setiap tahunnya.

"Setiap tahun kami harus melakukan pemeliharaan jalan. Ini persoalan lama yang tidak kunjung selesai. Maka dari itu, penataan kali ini menjadi tahap pertama," lanjutnya.

Menurutnya, Pemkot sempat menawarkan alternatif lokasi relokasi pedagang, yakni ke Terminal Hamid Rusdi. Namun, akhirnya mayoritas pedagang memilih untuk tetap di sekitar pasar, dengan bergeser sekitar 30 meter ke arah selatan dari lokasi semula.

Lebih lanjut, Wahyu menyebut proses kesepakatan tersebut telah melalui beberapa kali pertemuan antara pemerintah dan perwakilan pedagang. Dikatakannya, para pedagang juga telah menandatangani surat pernyataan dan menyatakan siap mengikuti penataan.

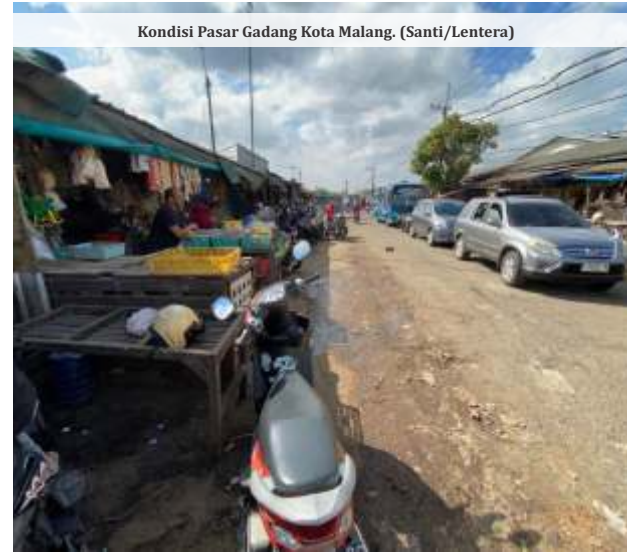
"Ada 686 lapak yang akan direlokasi. Semuanya berada di sisi selatan, mulai dari bekas Kantor UPT hingga ke arah jembatan. Kami akan tata ulang termasuk pembagian kios dan rencana tempat parkir agar tidak lagi menumpuk di pinggir jalan," tambah Wahyu.

Target relokasi tahap awal ini di-

rencanakan berlangsung dalam rentang waktu 1 hingga 6 bulan. Di mana seluruh proses pembongkaran dan pembangunan kios akan dilakukan secara mandiri oleh para pedagang. Pedagang juga diperkirakan akan menempati relokasi selama 3 tahun, hingga Pasar Induk Gadang selesai dibangun.

Sementara itu, perwakilan pedagang Pasar Gadang, Abdul Qodir, menyebutkan, para pedagang buah dan ikan akan menjadi kelompok pertama yang direlokasi ke lokasi sementara, setelah pembangunan area relokasi rampung.

Ia menyambut baik penataan tersebut karena pedagang juga menyadari pentingnya kelancaran akses jalan di kawasan Pasar Gadang. "Pedagang siap membangun tempat sementara secara swadaya. Kami ini



Kondisi Pasar Gadang Kota Malang. (Santi/Lentera)

juga warga Bumiayu, jadi sama-sama ingin akses jalan lancar," ujarnya.

Qodir menambahkan, dari total 686 pedagang yang akan direlokasi, tercatat ada 37 pedagang buah, 20 pedagang ikan, dan sisanya merupakan pedagang kebutuhan pokok dan lainnya, yang semuanya menempati jalur di sisi selatan pasar, mulai dari kantor UPT hingga ke arah jembatan. (Santi/Dya)

26 Kecamatan di Kabupaten Malang Masuk Daerah Rawan Bencana Hidrometeorologi



pada 8-11 Juli 2025.

"Kami telah meningkatkan fokus pengawasan di seluruh wilayah yang rawan bencana hidrometeorologi, menyusul adanya prediksi cuaca ekstrem dari BMKG," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, Rabu (9/7/2025).

Diketahui, BMKG Kelas I Juanda Sidoarjo, telah memperkirakan adanya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat akan melanda sejumlah daerah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten Malang. Cuaca ekstrem itu disertai potensi bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, hingga hujan es.

Sadono menjelaskan, hasil pemetaan BPBD Kabupaten Malang,

menunjukkan dari total 33 kecamatan di Kabupaten Malang, sebanyak 26 kecamatan dinyatakan rawan terhadap satu atau lebih jenis bencana hidrometeorologi. Kategori bencana yang dimaksud meliputi banjir dan banjir bandang, angin puting beliung, serta tanah longsor.

Untuk wilayah rawan banjir dan banjir bandang, BPBD mencatat 16 kecamatan, yakni Pujon, Ngantang, Kasembon, Karangploso, Dau, Singosari, Lawang, Pakis, Poncokusumo, Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Kalipare, dan Wagir.

"Sebagai tindak lanjut, mulai dari kemarin itu kami sudah bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas untuk mengirimkan alat berat. Alat tersebut digunakan untuk melakukan normalisasi sungai di Desa Purwodadi dan Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo yang sebelumnya terdampak banjir dua kali," terang Sadono.

Sementara itu, untuk wilayah rawan angin puting beliung,

disebutkannya ada 12 kecamatan yang teridentifikasi, yakni Karangploso, Dau, Singosari, Lawang, Pakis, Jabung, Tajinan, Poncokusumo, Bululawang, Gondanglegi, Sumberpucung, dan Kepanjen.

Adapun potensi tanah longsor tercatat di 17 kecamatan, yaitu Pujon, Ngantang, Kasembon, Karangploso, Dau, Singosari, Lawang, Poncokusumo, Tumpang, Ampelgading, Tirtoyudo, Dampit, Sumbermanjing Wetan, Wagir, Kromengan, Ngajum, dan Wonosari," katanya.

Sadono menegaskan, wilayah-wilayah tersebut akan mendapat prioritas pengawasan selama periode cuaca ekstrem. Pihaknya telah mengerahkan tim reaksi cepat (TRC) dan logistik ke beberapa kecamatan yang dinilai paling rawan.

"Selain patroli rutin, kami juga melakukan sosialisasi mitigasi kepada warga di daerah yang rentan. Warga diminta melapor segera jika terjadi peningkatan debit air atau tanda-tanda tanah longsor," tambahnya. (Santi/Dya)

Rusia Gempur Ukraina **REKOR! 741 RUDAL DITEMBAKKAN SEKALIGUS**

Otoritas Ukraina menyatakan bahwa Rusia telah meluncurkan serangan skala besar dengan menggunakan rudal dan drone, yang mayoritas menyasar wilayah barat negara tersebut. Pemerintah Kyiv menyebut ini sebagai serangan terbesar sejak dimulainya invasi Rusia pada tahun 2022.

Angkatan Udara Ukraina dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP dan media lokal Kyiv Post, Rabu (9/7/2025), mengonfirmasi skala besar serangan terbaru Rusia tersebut, dan menyebut target utamanya adalah wilayah Volyn dan kota Lutsk, yang ada di wilayah Ukraina bagian barat.

Disebutkan Angkatan Udara Ukraina bahwa serangan besar-besaran itu dimulai pada Selasa (8/7/2025) malam dan berlanjut hingga Rabu (9/7/2025) dini hari, dengan melibatkan total 741 senjata udara yang terdiri atas 728 drone jenis Shahed dan 13 rudal.

Serangan terbaru Rusia itu disebut sebagai serangan udara tunggal terbesar di Ukraina sejak invasi skala penuh dimulai pada Februari 2022.

Diklaim juga oleh Kyiv bahwa sistem pertahanan udaranya telah mencegah sebanyak 711 drone di antaranya dan setidaknya tujuh rudal berhasil dihancurkan.

Disebutkan bahwa sedikitnya empat lokasi terdampak puing-puing dan serangan langsung Rusia, dengan serpihan drone yang ditembak jatuh mendarat di setidaknya 14 area terpisah di Ukraina.

Laporan Kyiv Post, yang mengutip para pejabat setempat, menyebut serangan rudal Rusia itu memicu kebakaran dan menyebabkan kerusakan luas di wilayah Volyn dan kota Lutsk.

Wali Kota Lutsk, Ihor Polishchuk, mengatakan serangan itu memicu kebakaran di sebuah garasi bersama dan bisnis setempat. Beberapa lokasi lainnya masih diperiksa untuk

mengetahui kerusakan yang terjadi. Dia mengatakan sejauh ini belum ada laporan korban jiwa.

Serangan besar-besaran itu terjadi di tengah gelombang serangan yang lebih luas di seluruh Ukraina, termasuk rentetan ledakan di ibu kota Kyiv dan beberapa kota lainnya. Namun, para pejabat setempat mengatakan arah utama serangan Rusia jelas difokuskan pada area Volyn dan Lutsk.

Diketahui ledakan terdengar di kota Lutsk di wilayah barat Volyn Oblast sesaat sebelum pukul 4 pagi waktu setempat, Suspilne melaporkan, di tengah peringatan akan adanya pesawat nirawak dan rudal di udara. Kota tersebut merupakan salah satu yang paling parah terkena serangan tersebut.

Gubernur Oblast Volyn, Ivan Rudnytskyi, mengatakan wilayahnya memiliki sekitar 50 pesawat tanpa awak dan lima rudal yang berada di wilayah udaranya semalam, seraya



Akibat serangan Rusia terhadap Oblast Kyiv, Ukraine, pada Rabu (9/7/2025). (Foto: Layanan darurat negara)

menambahkan bahwa "hampir semuanya ditujukan ke Lutsk."

Wali Kota Lutsk, Ihor Polishchuk, mengatakan kebakaran tersebut merusak sebuah "lokasi industri" dan sebuah garasi, yang disebutnya sebagai "serangan Rusia paling masif" di kota itu sejak dimulainya perang skala penuh.

Di tempat lain di wilayah tersebut, atap sebuah rumah di Oblast Khmelnytskyi terbakar, kata administrasi militer daerah.

Setidaknya satu orang terluka akibat serangan itu, seorang wanita mengalami patah tulang dada di kota Brovary di Oblast Kyiv, administrasi militer regional melaporkan.

Angkatan Udara Ukraina memperingatkan pada 8 Juli malam bahwa Rusia telah meluncurkan

pesawat MiG-31 dari lapangan terbang Savasleyka di Nizhny Novgorod, yang menempatkan seluruh negeri di bawah ancaman rudal aktif selama berjam-jam. Kawan drone juga sedang menuju ke beberapa kota di Ukraina, kata militer. (Kyiv Post, AFP, The Kyiv Independent, ist/nei)

ALASAN PUTIN MENOLAK NEGOSIASI DAMAI DENGAN UKRAINA

- **Ukraina sebagai Proxy Barat**
Putin menganggap Ukraina dikendalikan AS dan NATO, sehingga negosiasi dianggap tak langsung dan manipulatif.
- **Tuntutan Ukraina Terlalu Tinggi**
Rusia menolak prasyarat Ukraina yang menuntut kembalinya seluruh wilayah, termasuk Krimea.
- **Keunggulan Militer Rusia**
Selama masih unggul di medan tempur, Rusia tidak merasa perlu berunding.
- **Tujuan Belum Tercapai**
Misi "denazifikasi dan demiliterisasi" belum selesai, menurut Kremlin.
- **Klaim Wilayah Sudah Sah**
Rusia menolak menyerahkan wilayah hasil referendum yang diklaim sah sebagai bagian dari Federasi Rusia.
- **Menunggu Kelelahan Barat**
Putin berharap dukungan Barat melemah, sehingga menunda negosiasi.
- **Citra Kuat di Dalam Negeri**
Berunding dianggap bisa merusak citra Putin sebagai pemimpin kuat di mata rakyat Rusia.



"Saya tidak senang dengan Putin. Dia membunuh banyak orang, termasuk tentaranya sendiri," ucap Trump. (TIME Magazine, ist/nei)

Trump Frustrasi, Putin Tolak Negosiasi Damai

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang terus menolak ajakan untuk melakukan negosiasi damai guna mengakhiri konflik di Ukraina. Dalam rapat kabinet yang disiarkan di televisi, Trump menyatakan bahwa usahanya membangun jalur diplomasi dengan Putin tidak membuahkan hasil.

"Kita sering mendapat banyak omong kosong dari Putin, sejujurnya. Dia selalu tampak ramah, tapi pada akhirnya itu tidak berarti apa-apa," ujar Trump seperti dilansir TIME Magazine, Rabu (9/7/2025).

Trump mengatakan dirinya kini "serius" mengingat Rancangan Undang-Undang Sanksi Rusia 2025 yang tengah dibahas di Senat AS. RUU tersebut fokus pada sanksi ekspor minyak Rusia, termasuk terhadap negara-negara yang mendukung perang di Ukraina.

Frustrasi Trump semakin dalam setelah Rusia justru meningkatkan intensitas serangan ke Ukraina, padahal ia mengaku telah mengirimkan pesan langsung kepada Putin agar segera menghentikan serangan terhadap warga sipil dan mau duduk di meja perundingan.

"Putin tidak memperlakukan manusia dengan benar, dia membunuh terlalu banyak orang. Oleh karena itu, kami mengirimkan beberapa senjata yang melindungi Ukraina, dan saya telah menyetujuinya," lanjutnya.

Trump juga membatalkan keputusan Pentagon yang sebelumnya menunda pengiriman misil pertahanan udara dan ancaman ke Ukraina. Ia mengakui, janji kampanyenya untuk mengakhiri perang Ukraina dalam 24 jam ternyata tidak mudah diwujudkan.

"Ini ternyata jauh lebih sulit," tambahnya.

Catat! Bahaya Kesehatan Makanan Terlalu Panas

Masakan yang baru saja matang dan masih mengeluarkan uap sering kali terlihat lebih menggugah selera. Tak sedikit orang yang langsung menyantapnya tanpa menunggu hingga suhunya turun. Padahal, kebiasaan ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, apalagi jika dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang.

Makanan bersuhu terlalu tinggi dapat merusak jaringan sensitif di mulut, tenggorokan, hingga sistem pencernaan. Selain menimbulkan rasa tidak nyaman, kebiasaan mengonsumsi makanan yang sangat panas juga berhubungan dengan risiko gangguan kesehatan serius. Dalam artikel ini, akan dibahas berbagai dampak tersembunyi dari makanan panas yang penting untuk diketahui agar kamu bisa lebih bijak saat menikmati hidangan kesukaan.

Risiko Luka Bakar pada Mulut dan Lidah

Makan makanan panas dapat menyebabkan luka bakar ringan pada permukaan mulut dan lidah. Hal ini biasanya ditandai dengan rasa perih, kemerahan, bahkan melepuh di bagian dalam mulut. Luka semacam ini mungkin terlihat sepele, tetapi dapat mengganggu kemampuan makan dan bicara selama beberapa hari.

Jika luka bakar terjadi terlalu sering, jaringan mulut bisa menjadi lebih sensitif dan rentan terhadap infeksi. Selain itu, luka di lidah atau langit-langit mulut dapat membuat rasa makanan berubah dan menurunkan nafsu makan.

Iritasi dan Kerusakan pada Tenggorokan

Selain mulut, tenggorokan juga bisa mengalami iritasi jika sering terpapar suhu makanan yang sangat panas. Konsumsi makanan panas secara berulan-

g dapat menyebabkan peradangan ringan hingga luka pada lapisan tenggorokan. Gejala yang sering muncul antara lain sakit saat menelan atau rasa perih berkepanjangan.

Dalam jangka panjang, iritasi kronis pada tenggorokan bisa menurunkan kualitas suara, menyebabkan batuk kering, atau memicu gangguan pernapasan ringan. Karena itu, sangat disarankan untuk menunggu makanan mencapai suhu yang nyaman sebelum dikonsumsi, terutama bagi orang yang memiliki riwayat gangguan tenggorokan.

Risiko Kanker Kerongkongan (Esofagus)

Salah satu bahaya paling serius dari konsumsi makanan panas adalah meningkatnya risiko kanker esofagus. Beberapa studi menyebutkan bahwa paparan suhu tinggi secara terus-menerus pada dinding kerongkongan dapat menyebabkan peradangan kronis dan kerusakan sel, yang lama-kelamaan bisa berkembang menjadi sel kanker.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahkan mengklasifikasikan konsumsi minuman atau makanan

bersuhu di atas 65°C sebagai faktor risiko kanker. Oleh sebab itu, penting untuk tidak mengabaikan suhu makanan, meskipun terlihat aman. Menunggu beberapa menit bisa memberikan perlindungan jangka panjang terhadap kesehatan pencernaanmu.

Merusak Email Gigi

Email gigi merupakan lapisan terluar dan terkeras pada gigi yang berfungsi melindungi jaringan di dalamnya. Namun, kebiasaan mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas dapat menyebabkan email gigi terkikis secara perlahan.

Ketika email gigi menipis, gigi menjadi lebih sensitif terhadap suhu makanan dan minuman, bahkan bisa terasa nyeri saat mengonsumsinya. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga meningkatkan risiko terjadinya gigi berlubang karena perlindungan alami gigi mulai berkurang.

Luka pada Lambung

Bukan pada area mulut saja. Mengonsumsi makanan atau minuman yang terlalu panas juga akan melukai

lambungmu. Hal ini disebabkan, suhu makanan atau minuman yang terlalu tinggi dapat membuat lambung iritasi, kemudian memproduksi HCl dan membuat perut terasa kembung dalam waktu yang lama.

Menikmati makanan hangat memang menyenangkan, tetapi penting untuk mengetahui batas aman suhu makanan yang bisa dikonsumsi. Terlalu terburu-buru dalam menyantap makanan panas justru bisa membawa dampak negatif yang tidak terlihat langsung, namun berbahaya dalam jangka panjang.

Mudah Merasa Lelah

Rasa lelah yang mudah dirasakan seseorang bisa jadi disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang terlalu panas. Suhu panas tersebut dapat memicu kerja organ tubuh menjadi lebih cepat, sehingga energi tubuh terkuras lebih banyak dari biasanya.

Akibatnya, tubuh menjadi lebih mudah merasa lelah dan lemas. Untuk menghindari hal ini, sebaiknya tunggu beberapa saat hingga makanan atau minuman tidak terlalu panas sebelum dikonsumsi, agar tidak membebani kerja organ tubuh secara berlebihan.

Gangguan Pencernaan

Mengonsumsi makanan yang terlalu panas dapat mengganggu kinerja lambung dan saluran pencernaan bagian atas.

Suhu tinggi dari makanan bisa menyebabkan iritasi pada dinding lambung dan kerongkongan, yang dalam jangka panjang berisiko menimbulkan gangguan pencernaan. Risiko ini akan semakin besar jika makanan panas dikonsumsi saat perut dalam keadaan kosong.
(nei,ist/dya)

AI Microsoft Bisa Saingi Dokter Manusia

Penelitian terbaru dari Microsoft menunjukkan bahwa kecerdasan buatan (AI) kini memiliki kemampuan melakukan diagnosis medis secara berurutan (sequential diagnostics) dengan tingkat akurasi dan efisiensi yang se-bandung, bahkan melebihi kinerja dokter manusia.

Studi yang diumumkan pada Senin (30/6) lalu menyoroti dua hal, pertama memperkenalkan tolok ukur baru untuk menguji performa alat diagnosis AI dibanding para ahli medis, serta hadirnya model-agnostic orchestrator untuk mengukur kemampuan AI ketika dibandingkan dengan tolok ukur tersebut.

Mustafa Suleyman, CEO Microsoft AI, menyebut pencapaian ini sebagai langkah besar menuju apa yang ia sebut sebagai superinteligensi medis.

“Cara mudah memahami superinteligensi medis adalah, model ini berkali-kali lebih baik dari manusia terbaik di dunia, memiliki keluasan wawasan dari sebagian besar dokter ahli di seluruh dunia, dan kedalaman pengetahuan layaknya pakar terbaik,” ujar Suleyman, mengutip Newsweek.

Untuk menguji AI dalam dunia medis, Microsoft mengembangkan SDBench, simulasi berbasis 304 kasus kompleks dari NEJM yang sulit didiagnosis bahkan oleh para ahli. Peserta diminta mengajukan pertanyaan atau pemeriksaan untuk



mencapai diagnosis, lalu hasilnya dibandingkan dengan standar NEJM.

Hasilnya, MAI Diagnostic Orchestrator (MAI-DxO) milik Microsoft mencapai akurasi 85,5%, jauh lebih tinggi dari dokter umum yang hanya 20%. Selain itu, MAI-DxO mampu menekan biaya diagnosis hingga 20% dengan memilih pemeriksaan yang lebih relevan dan efisien.

MAI-DxO bersifat model-agnostic, sehingga dapat bekerja dengan berbagai AI seperti OpenAI, Gemini, Claude, Grok, DeepMind, hingga Llama. Meski begitu, studi ini memiliki keterbatasan karena panel dokter yang terlibat tidak diizinkan menggunakan mesin pencari atau sumber eksternal saat menjalani uji SDBench.

Padahal, riset menunjukkan

banyak dokter kini sudah memanfaatkan teknologi digital dalam praktiknya. Meski belum dirilis luas, MAI-DxO menunjukkan performa awal yang menjanjikan. Dikembangkan sejak akhir 2024 oleh tim Microsoft AI Health, alat ini bertujuan meningkatkan akurasi diagnosis dan menekan biaya klinis.

“Ada dua hal yang sangat kami banggakan: menciptakan tolok ukur baru untuk menguji performa AI, dan membuktikan bahwa sistem orchestrator kami tampil luar biasa melampaui tolok ukur tersebut,” ujar King sebagaimana dikutip Newsweek. “Ini mungkin adalah proyek paling menegangkan dan menggairahkan yang pernah saya kerjakan.”

Setiap hari, lebih dari 50 juta pencarian terkait kesehatan dilakukan melalui produk Microsoft yang

menggunakan AI, seperti Copilot, Bing, Edge, dan MSN. Masyarakat kini semakin mengandalkan AI untuk memahami keluhan fisik atau gejala medis, dari sekadar sakit kepala hingga kondisi serius lainnya.

“Kami punya AI bernama Copilot, dan orang-orang datang untuk bicara soal kecemasan mereka, sakit kepala anak mereka, hingga penyakit yang mereka takutkan,” kata Suleyman. “Ini adalah percakapan yang berlangsung terus-menerus. Copilot bisa bekerja lebih baik jika punya pemahaman diagnostik yang kuat.”

Penelitian Microsoft berpotensi besar membantu dunia medis, seperti mempercepat dan menekan biaya diagnosis dengan hasil yang lebih akurat. Di AS, sekitar 7,4 juta orang salah diagnosis tiap tahun di ruang gawat darurat, dan 1 dari 350 kasus berujung pada kematian atau kecacatan, menurut studi 2023.

Microsoft kini bekerja sama dengan beberapa institusi kesehatan untuk menguji lebih lanjut sistem MAI-DxO, guna mengurangi kesalahan diagnosis dan pemborosan biaya akibat tes yang tidak perlu.

“Ini adalah sinyal awal yang sangat menjanjikan,” ujar King. “Tapi kami melihat ini sebagai perjalanan panjang bertahun-tahun yang butuh kolaborasi intensif dari seluruh sistem layanan kesehatan agar bisa berjalan dengan benar. (nei,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN “LENTERA TODAY”
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG:** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Model Rambut Rapi & Stylish Saat Wisuda

Wisuda merupakan momen istimewa bagi mahasiswa untuk merayakan pencapaian setelah melewati berbagai tantangan selama kuliah. Tak heran jika banyak yang menyambutnya dengan semangat dan persiapan yang matang.

Menjelang perayaan wisuda, biasanya para mahasiswi nggak hanya menyiapkan outfit, tapi juga mencari inspirasi model rambut. Memilih model rambut yang tepat memang penting, karena tampilan mahkotamu itu dapat memengaruhi penampilan.

Selain itu, tidak semua gaya rambut sesuai untuk acara wisuda karena harus disesuaikan dengan penggunaan toga. Sebagai inspirasi, simak berbagai model rambut wisuda untuk rambut pendek, sedang, dan panjang berikut ini. Dikutip dari laman Josh Wood Colour, berikut beberapa model rambut pendek yang cocok untuk acara wisuda:

Pixie Cut

Pixie cut adalah model rambut pendek yang lagi tren belakangan ini karena modis dan mudah di-styling. Untuk menciptakan kesan yang lebih glamor pada penampilanmu, tambahkan aksesoris seperti jepitan rambut yang warnanya senada dengan outfit-mu.

Textured Waves

Textured waves merujuk pada rambut yang dibuat bergelombang untuk menciptakan tekstur dan volume. Gunakan curling iron dan hair spray untuk menjaga gelombangnya tetap stay seharian. Model rambut ini akan membuatmu terlihat feminin dan juga modis.

Slicked Back

Jika ingin tampilan yang lebih simpel, cukup urai rambutmu dan sisir seluruhnya ke belakang dengan rapi. Gunakan serum atau gel untuk menciptakan tampilan yang lebih berkilau. Setelah itu, sempurnakan tatanan rambut dengan hair spray untuk menjaganya tetap rapi sepanjang hari. Untuk kamu yang memiliki rambut medium atau panjangnya sedikit di bawah bahu, cobalah model rambut berikut:

Rambut Diikat Setengah

Rambut yang diikat setengah termasuk model rambut yang versatile dan cocok digunakan dalam berbagai kesempatan. Gaya ini mampu menonjolkan seluruh fitur wajah, sehingga memberikan kesan lebih segar dan anggun pada penampilan.

Untuk tampilan yang lebih feminin, kamu bisa menambahkan sentuhan keriting (curl) pada bagian rambut yang terurai. Agar semakin manis, tambahkan jepitan atau aksesoris rambut pada bagian ikatan, sehingga gaya rambut terlihat lebih menarik dan elegan.

Kepang

Rambut yang dikepang dapat menciptakan tampilan yang lebih feminin dan anggun, cocok untuk berbagai acara formal maupun santai. Gaya kepang memberikan kesan rapi namun tetap stylish, sehingga menjadi pilihan favorit banyak orang.

Kamu bisa mengepang seluruh rambut atau hanya sebagian, sesuai dengan selera dan kenyamanan. Namun, pastikan kepangan tidak terlalu tebal, terutama jika akan mengenakan toga, agar tidak menyulitkan saat memakainya dan tetap terasa nyaman sepanjang acara.

Ikal

Gunakan curling iron untuk membentuk rambut ikal dengan ukuran yang agak besar. Teknik ini dapat memberikan volume dan tekstur alami pada rambut, sehingga tampilannya lebih dinamis dan menarik. Gelombang rambut yang dihasilkan menciptakan kesan elegan dan anggun, bahkan tanpa tambahan aksesoris apa pun. Gaya ini cocok untuk berbagai kesempatan, baik formal maupun kasual, karena tetap terlihat rapi namun tidak berlebihan.

Sanggul

Ingin tampil lebih anggun saat mengenakan kebaya wisuda? Kamu bisa memilih model rambut sanggul yang rendah atau terletak tepat di bagian tengkuk. Gaya ini memberikan kesan klasik dan elegan yang sangat serasi dengan kebaya.

Selain menambah keanggunan, sanggul rendah juga praktis karena tidak akan mengganggu saat mengenakan toga. Dengan posisi sanggul yang pas, tatanan rambut tetap rapi dan nyaman sepanjang acara wisuda berlangsung.

Kepang ekor ikan

Kepang ekor ikan adalah model rambut yang dikepang lurus ke bawah di bagian punggung. Gaya ini dikenal simpel dan praktis, serta menjadi pilihan yang nyaman karena tidak membuat gerah, terutama saat digunakan dalam waktu lama.

Untuk tampilan yang lebih menawan, kamu bisa menambahkan aksesoris seperti jepitan hias atau pita di bagian pangkal atau ujung kepang. Sentuhan kecil ini akan memberikan kesan manis dan mempercantik keseluruhan penampilan.

Hollywood Wave

Hollywood wave adalah gaya rambut bergelombang besar yang menyerupai bentuk ombak, memberikan tampilan klasik dan glamor. Gelombangnya yang teratur dan halus menciptakan kesan mewah yang cocok untuk acara formal seperti wisuda atau pesta.

Dalam penataannya, salah satu sisi rambut dibawa ke depan, sementara sisi lainnya diselipkan ke belakang telinga. (nei,ist/dya)



Situasi Global (dari Hal 1) ...

Terkait dengan situasi global yang terjadi saat ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan hal itu merupakan akibat dari kebijakan negara-negara besar terutama AS, Eropa, Jepang, RRT, Rusia dan sekarang BRICS yang kemudian saling menimbulkan dampak satu sama lain.

Sri Mulyani, dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI, Rabu (9/7/2025), memaparkan bahwa ketidakpastian arah kebijakan internasional dan terjadinya perbedaan antarnegara juga berperan pada terjadinya kondisi saat ini.

"Terutama juga muncul adalah kalau pihak negara itu selalu pasti ada perbedaan, itu bukan sesuatu yang baru perbedaan kepentingan, bedanya adalah bagaimana mekanisme untuk membahas dan menyelesaikannya," kata Sri Mulyani.

Dia mencontohkan, setiap ada perseteruan antarnegara pascaperang dunia II, maka yang menjadi wadah untuk menyelesaikan adalah PBB, IMF, Bank Dunia, WHO, WTO dan lainnya. Akan tetapi, lanjutnya, kondisi saat ini sangat berbeda, sebab dispute dan perbedaan sulit diselesaikan lagi oleh lembaga tersebut. Menurutny, saat ini peranan dari lembaga-lembaga multilateral itu menjadi sangat lemah atau tidak dihormati.

Apa yang terjadi itu menghasilkan kondisi global saat ini, dimana banyak negara-negara dengan kuasa besar yang memaksakan kepentingan dan tujuannya saat ini, kondisi ini hampir mirip dengan kondisi sebelum perang dunia. "Yang terjadi adalah hampir mirip dengan sebelum perang dunia ke-II yaitu kalau negara punya tujuan dan punya kepentingan. Dia kemudian secara sepihak bisa memaksakan kehendaknya kepada negara lain," tambahnya.

Sri Mulyani mengatakan apa yang terjadi ini menimbulkan ancaman dan invasi militer antar negara. Hal itu bisa dilihat dari perang yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, perang di Timur Tengah dan perang dagang Amerika Serikat (AS).

AS di bawah kendali Presiden Donald Trump, kata Sri Mulyani, secara eksplisit menyampaikan bahwa persaingan dengan China dianggap sebagai ancaman terbesar di bidang ekonomi dan keamanan. Maka dari itu, AS menerapkan kebijakan ketat untuk China, bahkan sampai ke tarif dagang dan perusahaan China.

Kebijakan yang dilakukan Presiden Trump ini dianggap sebagai langkah untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan ancaman terhadap AS. "Inilah yang sedang kita hadapi yang tadinya negara dalam konteks Global bekerja sama di mana satu negara bisa sejahtera dan makmur dengan mengajak negara lain untuk ikut sejahtera. Sekarang kalau satu negara sejahtera, berarti negara lain akan berkorb atau terkorbankan. Zero sum game menjadi dominan," papar Sri Mulyani.

Dengan kondisi ini tidak heran jika berbagai lembaga internasional memangkas proyeksi ekonomi global tahun ini dan tahun depan. Bahkan, IMF memprediksi ekonomi global hanya tumbuh 2,8 persen pada 2025 dan 3 persen pada 2026. Sementara itu, Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global di angka 2,3 persen tahun ini, serta 2,4 persen pada 2026.

Lantas apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menghadapi kondisi ini khususnya untuk merespons tarif impor yang ditetapkan Donald Trump? Seperti yang telah diketahui Trump mengumumkan produk Indonesia akan tetap dikenakan tarif impor 32 persen pada 1 Agustus 2025, kendati telah mengupayakan negosiasi.

Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia harus menyeimbangkan hubungan dengan AS dan memposisikan diri sebagai negara non-blok yang membuka hubungan dengan semua pihak. "Artinya dari sisi hubungan kita dengan Amerika Serikat pasti ada dari sisi investasi, perdagangan, dan dari sisi strategis," kata Sri Mulyani.

Dia juga mengatakan saat ini Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Perekonomian, dan kementerian terkait lainnya sedang mengatur langkah yang diperlukan untuk bisa memberikan tambahan bahan negosiasi. Sri Mulyani menyebut pemerintah berharap Indonesia bisa mendapatkan ketentuan yang lebih baik pada saat tarif diberlakukan 1 Agustus 2025 mendatang.

Sementara itu, Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpendapat pemerintah sebaiknya jangan terlalu permisif dengan kebijakan Trump. Dia menilai kebijakan perdagangan Trump egois

dan eksploitatif terhadap kelemahan mitra dagang.

"Kita mesti fokus dengan kekuatan ekonomi nasional sambil mengembangkan pasar non-tradisional yang memperlakukan kita sebagai mitra sejajar dalam perdagangan," kata Syafruddin dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (9/7/2025).

Syafruddin juga menyebut Indonesia tidak perlu takut dengan ancaman tarif tambahan untuk anggota BRICS. Menurut dia, sekarang adalah momen yang tepat bagi negara-negara Global South untuk memikirkan ulang tatanan global baru yang adil.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syamsu Rizal mengatakan kebijakan Trump khususnya mengenai tarif tambahan sebesar 10 persen kepada negara-negara yang tergabung BRICS itu yang jangan sampai mengganggu Prinsip Non-Blok.

Menurut Deng Ical, sapaan akrab Syamsu Rizal, hal tersebut berpotensi merusak tatanan hubungan internasional yang berlandaskan prinsip saling menghormati kedaulatan dan kebebasan menentukan arah kebijakan luar negeri.

"Ancaman seperti ini tidak bisa dibiarkan. Negara-negara, termasuk Indonesia, memiliki hak untuk menentukan arah politik luar negerinya secara mandiri. Prinsip negara non-blok harus dijaga dan dihormati oleh siapa pun, termasuk Amerika Serikat," tegas Deng Ical.

Politisi asal Dapil Sulawesi Selatan I itu menilai langkah Pemerintah Indonesia bergabung dengan BRICS merupakan bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama strategis dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan diplomasi

multilateral yang saling menguntungkan.

"Sikap Pemerintah Indonesia sudah tepat. Bergabung dengan BRICS merupakan bentuk strategi menjaga keseimbangan kekuatan global. Ini bukan soal berpihak atau memusuhi negara mana pun, tapi tentang memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global," lanjutnya.

Komisi I DPR RI, yang membidangi urusan luar negeri dan pertahanan, kata Deng Ical, mendukung penuh langkah pemerintah dalam menjalin kemitraan strategis dengan berbagai blok internasional selama tetap mengedepankan kepentingan nasional dan prinsip politik bebas aktif.

"Kami di Komisi I DPR RI mendukung penuh sikap pemerintah. Indonesia harus tetap teguh menjaga independensi politik luar negeri dan tidak tunduk pada tekanan dari negara mana pun," pungkasnya.

BRICS adalah kelompok negara-negara berkembang yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, serta sejumlah negara mitra yang belakangan turut bergabung, termasuk Indonesia. Kelompok ini dikenal mendorong reformasi dalam tata kelola global dan menjadi alternatif terhadap dominasi Barat dalam berbagai forum internasional.

Deng Ical juga mendorong Presiden Prabowo menjadikan momentum ini sebagai turning point untuk segera mengkonsolidasikan potensi Indonesia yang berbasis sumber daya alam (basic resources), termasuk sumber daya tanah jarang (Rare earth element).

"Kita mesti membangun positioning REE untuk membangun value advantage. Hal itu sejalan dengan kebijakan hilirisasi mineral," tegas mantan Wakil Wali Kota Makassar itu. (ant/ist/lut)

"Ancaman" Baru Donald Trump

PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Donald Trump, mengeluarkan "ancaman" baru yaitu memberlakukan tarif hingga 200 persen terhadap obat-obatan dan tarif tembaga 50 persen yang diimpor ke negaranya. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat cabinet pada Selasa (8/7/2025).

Bahkan terkait dengan obat-obatan, Trump mengatakan akan mengenakan tarif tinggi tersebut dalam waktu dekat. Meski begitu, dia menegaskan kebijakan itu tidak akan langsung berlaku.

Trump berencana memberi waktu satu hingga satu setengah tahun kepada produsen untuk memindahkan produksinya ke dalam negeri. "Kami akan beri mereka waktu untuk membereskan semuanya," ujarnya.

Sementara, untuk semua impor

tembaga, Trump juga tidak menyebutkan kapan akan berlaku. Dalam rapat kabinet pada Selasa itu, Trump mengatakan, "Saya yakin tarif untuk tembaga akan kami tetapkan sebesar 50 persen," katanya.

Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, mengatakan rincian tarif akan diumumkan pada akhir bulan ini. Menurut dia, studi mengenai dampak impor obat dan semikonduktor sedang dalam tahap akhir. "Untuk obat-obatan dan semikonduktor, studi terkait sedang diselesaikan pada akhir Juli," ujarnya.

Menurut Lutnick, Trump akan menetapkan kebijakan setelah studi itu selesai dan dia akan membiarkan Presiden memutuskan sendiri implementasinya. Meski begitu, belum ada jaminan bahwa tarif akan benar-benar diberlakukan sesuai ancaman. Seperti kebijakan tarif

sebelumnya, Trump kerap mengubah arah kebijakannya sendiri jika menghadapi resistensi.

Ini merupakan pernyataan paling tegas Presiden AS itu terkait tarif khusus sektor farmasi sejak April 2025. Saat itu, pemerintah memulai penyelidikan berdasarkan Pasal 232 yang memungkinkan evaluasi impor terhadap keamanan nasional.

Jika diterapkan, tarif ini akan menjadi pukulan besar bagi industri farmasi. Selama ini, pemerintah telah diperingatkan bahwa kebijakan tersebut bisa menaikkan biaya produksi dan menghambat investasi di AS.

Tarif tersebut juga dikhawatirkan akan mengganggu rantai pasok obat yang pada akhirnya bisa membahayakan pasien. Industri farmasi juga masih menghadapi tekanan dari kebijakan harga obat versi Trump. (ant/ist/lut)

GELAR PERKARA KHUSUS DUGAAN IJAZAH PALSU JOKOWI

TPUA DAN YAKUP SAMA-SAMA BERSIKUKUH

Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik) Polri melakukan gelar perkara khusus terhadap hasil penyelidikan Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri terkait dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), di Bareskrim Polri, Rabu (9/7/2025). Setelah gelar perkara selesai, pihak Jokowi maupun dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) sama-sama bersikukuh atas pendapat mereka.



Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, permohonan gelar perkara khusus ini diajukan TPUA pada Senin (30/7/2025). Kemudian, TPUA membuat surat permohonan pelibatan nama-nama dalam gelar perkara khusus tersebut pada Selasa (2/7/2025).

"Dan memohon penjadwalan ulang gelar perkara khusus sampai mereka mendapatkan kepastian atas nama-nama yang dilibatkan dalam proses gelar perkara khusus dimaksud," ujar Trunoyudo.

Terdapat empat nama telah diputuskan agar ikut dilibatkan dalam gelar perkara khusus yakni Komnas HAM, DPR, Pakar Telematika Roy Suryo, dan Akademisi sekaligus alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) Rismon Hasiholan Sianipar. Gelar perkara khusus yang dimulai pukul 10.00 WIB dan berlangsung tertutup.

Usai gelar perkara khusus tersebut, Ahli Digital Forensik, Rismon Sianipar memberikan keterangan dan mengaku sangat kecewa karena Jokowi tidak hadir. Dia juga mempersoalkan ketidakhadiran pihak Universitas Gadjah Mada (UGM).

"Kami sangat kecewa dengan ketidakhadiran dari Pak Jokowi yang membawa ijazah katanya asli, katanya lulusan UGM, dan ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik. Tetapi itu semua tidak dimanfaatkan. Sayang sekali ya," kata Rismon usai gelar perkara di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).

Maka itu, Rismon memastikan ijazah Jokowi palsu. Dia menyebut

pihak Jokowi tak berani menampilkan ijazah Jokowi versi digital dalam gelar perkara khusus tadi.

Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah. Menurut Rizal, juga mempersoalkan ketidakhadiran Jokowi dalam gelar perkara khusus terkait dugaan ijazah palsu tersebut. Dia mengatakan bahwa Jokowi seharusnya hadir.

"Ya, yang pertama sebenarnya Jokowi seharusnya hadir membawa ijazah yang disebut aslinya itu. Tapi ternyata Jokowi tidak hadir. Jokowi tidak membawa juga apalagi ijazahnya tidak hadir," kata Rizal di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).

Rizal menambahkan, kuasa hukum Jokowi juga tidak membawa ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Padahal, kata Rizal, gelar perkara khusus hari ini sangat penting. "Itu seharusnya hadir Pak Jokowi dengan membawa ijazahnya. Tapi itu tidak. Itulah gambaran bahwa dia takut, dia pengecut, something wrong. Ada sesuatu yang salah pada dokumennya itu," tuturnya.

Sementara itu, Pakar Telematika, Roy Suryo menyebutkan bahwa ijazah Jokowi tidak identik dengan tiga pembanding. Hal itu berdasarkan dari analisa fotokopi ijazah Jokowi menggunakan sistem Error Level

Analisis (ELA) dengan tiga ijazah pembanding yaitu nomor 1115 milik Frono Jiwo, ijazah nomor 1116 milik almarhum Hari Mulyono, dan ijazah nomor 1117 milik Sri Murtiningsih.

"Nah hasilnya apa? Inilah teman-teman tiga ijazah pembanding ketika kemudian dibandingkan dengan ijazah

Joko widodo not match, tidak identik," kata Roy di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2025).

Padahal, ketiga ijazah itu identik satu sama lain. Huruf A di halaman depan ijazah sama-sama berada dalam logo. Sementara itu, huruf A di ijazah Jokowi berada di luar logo.

Roy mengaku siap bila Polri ingin menghadirkan dua dari tiga pemilik ijazah tersebut di Bareskrim Polri. Sementara Hari Mulyono tidak bisa dihadirkan, karena telah meninggal.

"Sangat setuju silakan, silakan hadirkan, Frono Jiwo silakan hadir, Sri Murtiningsih silakan hadir, tapi almarhum

Hary Mulyono jangan, kita challenge polisi menghadirkan Frono Jiwo, Sri Murtiningsih," ungkapnya.

Selain itu, Roy juga juga memaparkan dalam gelar perkara khusus bahwa foto Jokowi yang terdapat dalam ijazah tidak identik dengan foto saat ini. Malah, identik dengan foto seseorang bernama Dumatno Budi Utomo, yang

merupakan sepupu Jokowi.

Roy berharap, apa yang dipersembahkan pihaknya untuk Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) bisa membuat terang kasus ijazah Jokowi. Khususnya, mengubah kesimpulan ijazah Jokowi identik atau asli menjadi tidak identik atau palsu

"Tapi tentu itu semua, kita juga harus mohon doa. Moga-moga mereka semua yang ada di ruangan diberikan hidayah oleh Allah SWT," pungkask dia.

Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakup Hasibuan, mengatakan bahwa penyelidikan yang dilakukan Bareskrim Polri sudah sesuai dengan SOP (Standard Operating Procedure). Sehingga dia menyatakan bahwa kasus tersebut sudah tuntas. "Jadi gelar perkara khusus hari ini sudah selesai dan mengonfirmasi bahwa penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri itu sudah sesuai dengan SOP yang seharusnya. Jadi, case close," ujar Yakup dilansir kompastv, Rabu (9/7/2025).

Berdasarkan gelar perkara khusus tersebut, Yakup menandakan bahwa sudah tidak ada peluang lagi untuk mempermasalahkan perkara tersebut. Dia juga menyebutkan TPUA tidak berhasil menunjukkan di mana cacatan penyelidikan Bareskrim. Selain itu, TPUA juga tidak berhasil membeirkan novum (bukti baru).

Terkait dengan permintaan TPUA supaya pihak Jokowi menunjukkan ijazah asli, Yakup mengaku tidak ada kewajiban secara hukum untuk memenuhi permintaan tersebut. "Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak," kata Yakup.

Kemudian, dia menjelaskan bahwa UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah juga sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli. KPU juga memverifikasi dan menyatakan ijazah Jokowi asli juga. "Mereka lapor ke polisi, polisi juga sudah bilang ini asli, identik, tidak ada dugaan tindak pidana. Sekarang mereka minta lagi gelar, masih belum puas," tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Yakup mengatakan bahwa pada awalnya dia keberatan dengan gelar perkara khusus ini, sebab tidak ada dasar hukumnya. Namun, untuk menghormati penyidik maka dia menghadiri gelar perkara khusus itu.

Lantas, Yakup menyatakan harapan pihaknya bahwa gelar khusus akan memperjelas perkara ini. (han/ist/lut)

Nah hasilnya apa? Inilah teman-teman tiga ijazah pembanding ketika kemudian dibandingkan dengan ijazah Joko widodo not match, tidak identik,"

ROY SURYO
Pakar Telematika